



# RENCANA AKSI KINERJA

PERWAKILAN BPKP PROVINSI MALUKU

Tahun 2021





**BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN  
PERWAKILAN PROVINSI MALUKU**

Jalan Waihaong Pantai, Ambon 97112  
Telepon (0911) 353534 Faksimile (0911) 352197  
Website: [www.bpkp.go.id/maluku](http://www.bpkp.go.id/maluku), E-mail : [maluku@bpkp.go.id](mailto:maluku@bpkp.go.id)

---

**RENCANA AKSI KINERJA TAHUN 2021**

Dalam memastikan terwujudnya target kinerja yang telah diperjanjikan dalam Dokumen Perjanjian Kinerja Nomor:S-739/PW25/6/2021 tanggal 30 Maret 2021, Perwakilan BPKP Provinsi Maluku telah menyusun rencana aksi kinerja sebagai salah satu sarana pengendalian dalam mencapai tujuan organisasi.

Rencana Aksi Kinerja akan dipedomani oleh seluruh pegawai sebagai:

- 1) Media untuk membangun komitmen dalam mencapai kinerja yang diharapkan dan untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja pegawai;
- 2) Arah kebijakan dan strategi bersama dalam mencapai tujuan dan sasaran kinerja serta sebagai dasar kolaborasi pelaksanaan kegiatan dan sinergi dengan mitra kerja;
- 3) Sarana untuk monitoring, evaluasi; dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja;

Rencana aksi telah memperhatikan pencapaian target kinerja pelaksanaan beberapa kegiatan yang membutuhkan keterlibatan banyak pihak dan risiko dari setiap kegiatan utama sehingga diharapkan tidak mengganggu pencapaian target kinerja masing-masing yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja.

Ambon, 31 Maret 2021  
Kepala Perwakilan,

Rizal Suhaili  
NIP 19670924 198803 1 001

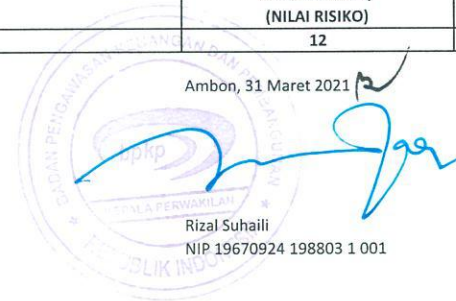


No.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET 2020	TARGET KINERJA				No. KEGIATAN UTAMA	RISIKO UTAMA/ (NILAI RISIKO)	ANGGARAN	PIC	SATUAN	TW1	TW2	TW3	TW4	
					TW1	TW2	TW3	TW4										
11	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Kualitas Pengendalian Intern K/L/P/BU	Jumlah APIP yang Mengimplementasikan Siswaskeudes	jumlah APIP	3				3										
<b>BIDANG AKUNTAN NEGARA</b>																		
1	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Badan Usaha	Jumlah BUMD dengan kinerja sehat	jumlah BUMD	3				3	1	Pengawasan atas Peran BUMD dan Badan Usaha	Stakeholder tidak siap melaksanakan saran hasil evaluasi	62.310.000	Korwas AN	Kegiatan	1	1		
2	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Badan Usaha	Jumlah BLUD dengan kinerja sehat	jumlah BLUD	1				1	2	Pengawasan atas Peran BUM Desa	Hasil kegiatan consulting (bimbingan teknis, asistensi dan sosialisasi) tidak diimplementasikan oleh stakeholder			Kegiatan	1			
3	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Badan Usaha	Jumlah BUMDes yang mampu menyusun laporan	jumlah BUMDes	28				28	3	Pengawasan terkait COVID-19	Stakeholder tidak menyiapkan/menyerahkan data untuk diaudit			Kegiatan	2			
									4	Pengawasan atas peran BLUD	Hasil kegiatan assurance (bimbingan teknis, asistensi dan sosialisasi) tidak ditindaklanjuti			Kegiatan	1			
<b>BIDANG INVESTIGASI</b>																		
1	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Keuangan Negara/Daerah	Nilai efisiensi pengeluaran negara dan daerah	juta rupiah	186.779				186.779	1	Pengawasan keinvestigasian atas Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah pada Institusi Pemerintah dan Korporasi Negara/Daerah (Audit Penyesuaian Harga/Klaim)	Stakeholder tidak menyiapkan/menyerahkan data untuk diaudit/tidak ada permintaan audit	250.500.000	Korwas Investigasi	Kegiatan		1		
2	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Keuangan Negara/Daerah	Nilai penyelamatan keuangan negara dan daerah	juta rupiah	40.679				40.679	2	Pengawasan keinvestigasian atas indikasi permasalahan tertentu (AI, PKKN dan ATTLBI)	Kegiatan di luar Rencana Kerja Tahunan tidak dianggarkan			Kegiatan	2	2	1	
3	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Pembangunan Nasional	Persentase hambatan pelaksanaan pembangunan yang diselesaikan	persen	80				80	3	Evaluasi hambatan kelancaran pembangunan	Tidak terjadi kesepakatan antara pihak-pihak yang dimediasi dalam menyikapi permasalahan yang ada			Kegiatan				1
4	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Efektivitas Pengendalian Korupsi	Persentase hasil pengawasan represif yang dimanfaatkan/ditindaklanjuti	persen	100				100	4	Bimbingan teknis FCP, atau FCP Tematik, misalnya WBS, fasilitasi penyelenggaraan MPAK untuk membentuk KomPAK, pelaksanaan FRA, fasilitasi pengukuran EPK	Hasil kegiatan consulting (bimbingan teknis, asistensi dan sosialisasi) tidak diimplementasikan oleh stakeholder			Kegiatan		1	1	
5	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Efektivitas Pengendalian Korupsi	Persentase hasil Pengawasan preventif dan edukatif yang dimanfaatkan/ ditindaklanjuti	persen	75				75										
<b>BIDANG P3A</b>																		
1	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Kualitas Pengendalian Intern K/L/P/BU	Jumlah APIP Pemda dengan Kapabilitas APIP ≥ Level 3	APIP	5				5	1	Bimtek Peningkatan Kapabilitas APIP	Hasil kegiatan consulting (bimbingan teknis, asistensi dan sosialisasi) tidak diimplementasikan oleh stakeholder	78.574.000	Korwas P3A	Kegiatan		1		
									2	QA atas SA Kapabilitas APIP				Kegiatan		2		
									3	Evaluasi & Sosialisasi JFA				Kegiatan		3		
<b>BAGIAN TATA USAHA</b>																		
1	Meningkatnya Kualitas Layanan "Ketatausahaan" Unit Kerja	Nilai Skor Zona Integritas Unit Kerja	Skor Skala 100	91				91	1	Penilaian RB Unit Kerja	Kegagalan BPKP memperoleh nilai A atas hasil evaluasi RB						1	



No.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET 2021	TARGET KINERJA				No.	KEGIATAN UTAMA	RISIKO UTAMA/ (NILAI RISIKO)	ANGGARAN	PIC	SATUAN	TW1	TW2	TW3	TW4
					TW1	TW2	TW3	TW4							16	17	18	19
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

Ambon, 31 Maret 2021



Rizal Suhaili  
NIP 19670924 198803 1 001